

Positif Virus Korona Belum Berhenti

SUKOHARJO (KR) - Positif virus korona Sukoharjo mengalami kenaikan menyolok terakumulasi 555 kasus. Kenaikan juga terjadi pada kasus meninggal dunia ikut melonjak dari sebelumnya hanya 19 kasus menjadi 24 kasus. Kenaikan kasus tersebut terjadi karena faktor kontak erat sebelumnya. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sukoharjo Yunia Wahdianti, Jumat (18/9), mengatakan, data per 17 September diketahui ada kenaikan secara keseluruhan di berbagai kelompok penanganan baik rawat inap, isolasi mandiri, sembuh dan selesai isolasi mandiri dan meninggal dunia. Perkembangan data diketahui akumulasi kasus positif virus korona mencapai 555 kasus. Jumlah kasus positif virus korona mengalami kenaikan signifikan. Sebab sebelumnya hanya ada 538 kasus. Artinya ada kenaikan sebanyak 17 kasus hingga terakumulasi secara keseluruhan menjadi 555 kasus. Kenaikan kasus positif virus korona di Sukoharjo dalam beberapa hari diketahui signifikan. **(Mam)**

Penghargaan MKK untuk Bupati Cilacap

CILACAP (KR) - Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menerima penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK), sebagai wujud dukungan dan komitmennya terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)) yang di Cilacap dilaksanakan melalui Program Bangsa Kencana. Penghargaan MKK diberikan langsung Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo SP OG (K), dalam kunjungannya ke Cilacap, Kamis (17/9). Menurut Tatto, program Bangsa Kencana telah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana strategis (Renstra) Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk melaksanakan program pengendalian kependudukan itu secara optimal. Hal itu bisa dilihat dari besarnya dana APBD Tahun 2019 yang dialokasikan untuk Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB PP PA) Kabupaten Cilacap, yang sebesar Rp 14,9 miliar, dalam bentuk belanja langsung. Sedang tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp 14,4 miliar. **(Mak)**



KR-R MaksuM Noor
Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo menyerahkan penghargaan MKK kepada Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji.

HUKUM

42 Warga Terjaring Razia Masker

TEMANGGUNG (KR) - Sebanyak 42 orang terjaring razia saat petugas Satpol PP Temanggung melakukan operasi penegakkan Perda Disiplin Protokol Kesehatan (Prokes) penggunaan masker di Kecamatan Kranggan, Selasa (15/9).
Belum ada penerapan hukuman denda. Mereka yang kedapatan tidak memakai masker mendapat sanksi sosial, di antaranya kerja sosial berupa menyapu jalan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu tradisional dan menghafal Pancasila.
Kasi Penegakkan Peraturan Daerah Satpol PP Temanggung, Muhammad Akbar, mengatakan razia untuk menertibkan masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
"Sebagai langkah edukasi, mereka

yang terjaring mendapat teguran secara lisan, dan secara administratif. Sedangkan hukuman sosial, *push up* dan bersih-bersih jalan," jelasnya.
Setelah sanksi sosial, kedepan pelanggar akan dilakukan penegakkan disiplin yang dapat berupa denda.
Diakui, sebagian masyarakat belum paham maksud pemerintah mengeluarkan berbagai aturan protokol kesehatan. "Kami beri edukasi, hingga masyarakat paham," jelasnya.
Razia akan terus digelar dalam beberapa waktu kedepan, dengan bekerja sama dengan Polres Temanggung. Bentuk sanksi masih hukuman sosial.
Sedangkan titik razia akan bergeser dari satu tempat ke tempat lain atau dari kecamatan satu ke kecamatan lain dengan memperhatikan penyebaran populasi penduduk. **(Osy)**

Dua Pembobol ATM Ditembak

SEMARANG (KR) - Belum sempat menghabiskan uang hasil kejahatannya, 2 dari 4 pembobol ATM di SPBU Gombel Semarang ditangkap.
Keduanya yakni Ah (39) dan Ek(41) semua asal Jabar, terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Sementara 2 rekan mereka masih diburu.
"Saya mengimbau kedua pelaku yang sudah diketahui identitasnya lebih baik menyerahkan diri. Jika tidak, kami akan terus memburu," pesan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Aulia Lubis, Kamis (17/9).
Menurut Kapoltabes, selain meringkus Ah dan Ek di daerah Bogor dan Bekasi, pihaknya juga menyita barang bukti di antaranya uang Rp 23 juta dari uang kejahatan Rp 100 juta, berbagai alat pertukangan, 4 motor yang bisa dipakai beroperasi.
Keempat motor itu yang sengaja didatangkan dari

daerah asalnya dengan di-kendarai dan dititipkan di Salatiga setelah dipakai operasional membobol ATM khusus di SPBU Gombel. Kemudian, para pelaku pulang ke daerah asal naik angkutan umum bus.
Khusus di Semarang, selain membobol ATM di dekat SPBU Gombel dengan hasil uang Rp 100 juta, para pelaku juga be-raksi di ATM daerah Banyumanik.
Kanit Resmob Polrestabes Semarang, Iptu Reza Arif Hadafi, menjelaskan dengan dibekuknya Ah dan Ek, pihaknya masih terus mengembangkan kasus tersebut, apalagi dua pelaku lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO). **(Cry)**



KR-Karyono
Kedua pembobol ATM digelandang ke Mapolrestabes Semarang.

6 BULAN TUTUP AKIBAT PANDEMI COVID-19

Kunjungan Wisata Potensi Turun Hingga 90%

WONOSOBO (KR) - Pululan telak dialami sektor pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Lebih dari 98 destinasi pariwisata terpaksa ditutup selama 6 bulan terakhir akibat pandemi virus korona (Covid-19). Bahkan potensi penurunan kunjungan wisata hingga akhir 2020, diperkirakan bisa mencapai 90%.
"Saat ini penurunan jumlah wisata di Wonosobo sudah mencapai 80% jika dibandingkan capaian bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Jika hingga akhir tahun kondisinya masih sama, maka potensi penurunan kunjungan wisata bisa mencapai 90%," tandas Kabid Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Wonosobo Edy Santoso, Jumat (18/9).
Menurutnya, objek wisata di Kabupaten Wonosobo sebagian besar mengandalkan keindahan alam yang

menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Untuk diperlukan akselerasi atau percepatan untuk membangkitkan sektor pariwisata agar tidak terus terpuruk.
Salah satu solusinya adalah dengan mulai membuka kembali sejumlah destinasi wisata dengan penerapan protokol kesehatan ketat bagi penyelenggara maupun pengunjung objek wisata.
Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 Tahun 2020, tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), maka setiap pelaku usaha, termasuk di dalamnya pelaku usaha pariwisata diwajibkan untuk mentaati protokol kesehatan demi mencegah penularan virus corona.
Seperti terpenuhinya fasilitas tempat usaha dengan sejumlah instrumen pendukung gerakan 3M (mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak aman

pengunjung).
Dalam hal ini, lanjut Edy, kedisiplinan para pengunjung objek wisata jelas menjadi faktor penting dalam upaya menghidupkan kembali pariwisata di tengah pandemi Covid-19 dengan pola adaptasi kebiasaan baru (AKB).
Seperti kebiasaan pengunjung di era media so-

sial yang cenderung lebih banyak berswa foto (selfie), yang berpotensi menjadi salah satu faktor penularan, disebut Edy bisa disiasati. **(Art)**



KR-Ariswanto
Salah satu tempat berswafoto bagi pengunjung wisata sembari menikmati keindahan alam di kawasan wisata Telaga Warna Dieng Wonosobo.

WARGA TUNGGU DISTRIBUSI BANTUAN AIR BERSIH

Kekeringan Meluas, Mencapai Lima Kecamatan

TEMANGGUNG (KR) - Kekeringan di Kabupaten Temanggung terus meluas. Kini telah dialami di lima kecamatan. Padahal minggu lalu baru pada tiga kecamatan, atau bertambah dua kecamatan.

Dampak kekeringan sangat dirasakan petani, karena tidak bisa mengairi sawah, naik untuk tanaman padi maupun tembakau.
Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung Edy Murjanto mengatakan lima kecamatan yang daerahnya mengalami kekeringan dan krisis air bersih adalah Kaloran, Kranggan, Kandangan, Gemawang, dan Tlogomulyo. Warga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, mandi, hingga mengairi persawahan.
Edy Murjanto mengemukakan, BPBD telah mendistribusikan sekitar 25 tangki air bersih pada warga yang mengalami krisis air bersih. Distribusi dilakukan seti-

daknya dua atau tiga kali dalam waktu seminggu. Sedang persediaan anggaran pada tahun ini sebanyak 500 tangki air bersih. Diakui, bahwa distribusi air bersih memang belum merata. Namun demikian, dalam waktu dekat kebutuhan masyarakat akan air bersih aka segera terpenuhi.
"Semoga persediaan yang dianggarkan mencukupi, sesuai prakiraan BMKG, awal musim hujan diperkirakan bulan Oktober sampai November 2020," Edy Murjanto, Jumat (18/9).
Dikemukakan pendistribusian air bersih saat ini menggunakan

dua mobil tangki. Mobil tersebut dari BPBD Temanggung, yang dioperasikan mulai 19 Agustus 2020 di wilayah Kecamatan Tlogomulyo.
Edy Murjanto meminta kepada masyarakat yang mengalami kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih supaya mengajukan surat permohonan melalui desa masing-masing.
Dikatakan, berdasar pengalaman tahun 2019, ada 13 kecamatan di 55 desa di Kabupaten Temanggung yang mengalami kekeringan dan mengajukan bantuan air bersih. **(Osy)**

DUGAAN PENYIMPANGAN ANGGARAN DHL

Penanganan Perkara Ditingkatkan ke Penyidikan

PURBALINGGA (KR) - Kajari Purbalingga, Lalu Syaifuddin SH MH, menerbitkan Surat Perintah Penyidikan perkara dugaan penyimpangan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Purbalingga.

Tim penyidik dipimpin Kasi Pidsub Meyer Volmar Simanjuntak SH MH dengan lima anggota.
"Ada dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Purbalingga. Sejauh ini baru ditemukan nilainya sebesar Rp 600 juta," tutur Lalu Syaifuddin didampingi Kasi Pidsub Meyer Volmar Simanjuntak dan Kasi Intelijen Indra Gunawan SH, Jumat (18/9).
Diungkapkan, dugaan penyimpangan terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Anggaran yang diduga diselewengkan berupa anggaran bahan bakar minyak (BBM) truk sampah sebesar Rp 500 juta dan retribusi sampah dari masyarakat sekitar Rp 100 juta.
"Anggaran BBM dari dana APBD Kabupaten. Sedangkan retribusi sam-

pah dari masyarakat tidak dimasukkan ke kas daerah," ujarinya.
Berdasarkan laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan tersebut, Seksi Intel melakukan penyelidikan dan pengumpulan data. Setelah dilakukan penyelidikan

sekitar empat bulan, Kejari mendapatkan cukup bukti dan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan.
"Saat ini belum ada tersangka. Tapi kami sudah meminta keterangan terhadap 35 orang. Tersangka bisa diketahui setelah

proses penyidikan selesai," ujutinya.
Meyer menambahkan, proses penyidikan ditargetkan selesai paling lama dua bulan. Pihaknya masih menunggu hasil penghitungan riil kerugian negara dari pihak auditor.
"Kerugian negara kan dari hitungan kami sekitar Rp 600 juta. Tapi bisa berpotensi naik karena penghitungan riil dari auditor belum selesai," tuturnya. **(Rus)**



KR-Toto R
Kajari Purbalingga menyampaikan keterangan pers.

Korban Sodomi Bertambah Jadi 10 Anak

PURWOKERTO (KR) - Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Em (16) pelaku pencabulan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banyumas memastikan korban pencabulan bertambah menjadi 10 anak dari sebelumnya 3 anak bawah umur.
Kasat Reskrim Polresta Banyumas, AKP Berry, Jumat (18/9), mengatakan korban pencabulan saat ini menjadi 10 orang.
"Pencabulan itu terjadi pada seminggu lalu, yaitu pada Rabu (9/9) lalu di sebuah pos Kamling Purwokerto Utara," jelasnya.
Sepaimana diberitakan oleh media ini sebelumnya jika ada tiga

korban, dua di antaranya berusia 10 tahun, sedangkan satu lagi masih berusia 9 tahun. Namun setelah dilakukan pemeriksaan korbannya bertambah menjadi 10 anak.
Untuk mengetahui kemungkinan masih ada korban lagi, penyidik masih melakukan pengembangan dengan memintai keterangan tersangka dan sejumlah saksi korban.
Modus tersangka saat menaculi korban adalah dengan cara bujuk rayu menjanjikan akan memberi hadiah coklat.
Kasus tersebut dapat terbongkar setelah salah satu orangtua korban (pelapor) saat pulang kerja dan mendapati anaknya menangis.
Kemudian orangtua korban mem-

intai keterangan dan ananknya mengaku jika telah disodomi oleh tersangka. Kasus itu kemudian dilaporkan ke polisi.
Kanit PPA Satreskrim Polresta Banyumas, Iptu Yusuf Triwijanto, menambahkan jika pelaku Em melakukan kejadian tersebut terinspirasi dari film-film porno.
Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaku dijerat Pasal 82 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 jo UU No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. **(Dri)**